

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KLUNGKUNG
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

Nomor : 004/HM.07.02/K.BA-07/06/2024

\Nomor : B.10.000.4.7.1/2683/SMKN 1 KLK/DIKPORA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **2024**, bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. I Komang Supardika, S.E

: Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. I Wayan Siarsana, S.Pd

: Selaku Kepala SMKN 1 Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jl. Subali II, Br. Siku, Ds. Kamasan, Klungkung – Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung merupakan jenjang pendidikan menengah kejuruan pada pendidikan formal di Kabupaten Klungkung .

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal I

KETENTUAN UMUM

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani

kasus pelanggaran administratif Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah, dan madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- (4) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta pengawas Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Nota Kesepahaman ini terkait dengan kerja sama meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Klungkung.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar;
- b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Klungkung;
- c. Sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
- d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung;

- e. Menjaga kondusifitas Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Klungkung;
- f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

- a. Kewajiban
 - Melakukan sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Atas Kejuruan Negeri 1 Klungkung yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif pemilihan;
 - Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung.
- b. Hak
 - Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung
 - Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses pemilihan di Kabupaten Klungkung.

PIHAK KEDUA

- a. Kewajiban
 - Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif pemilihan terhadap siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung;
 - Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung.
- b. Hak
 - Mendapatkan sosialisasi terhadap siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilihan;
 - Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses pemilihan di Kabupaten Klungkung.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak-pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman ini.

- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

Pasal 9 **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 **KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12 **PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**



I KOMANG SUPARDIKA, S.E

**PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 KLUNGKUNG**



I WAYAN SIARSANA, S.Pd
NIP. 196611221988031006

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KLUNGKUNG
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

Nomor : 004/HM.07.02/K.BA-07/06/2024

Nomor : B.10.000.4.7.1/2683/SMKN 1 KLK/DIKPORA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **2024**, bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. I Komang Supardika, S.E

: Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. I Wayan Siarsana, S.Pd

: Selaku Kepala SMKN 1 Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jl. Subali II, Br. Siku, Ds. Kamasan, Klungkung – Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung merupakan jenjang pendidikan menengah kejuruan pada pendidikan formal di Kabupaten Klungkung.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal I

KETENTUAN UMUM

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani

kasus pelanggaran administratif Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah, dan madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- (4) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta pengawas Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Nota Kesepahaman ini terkait dengan kerja sama meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Klungkung.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar;
- b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Klungkung;
- c. Sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
- d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung;

- e. Menjaga kondusifitas Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Klungkung;
- f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

- a. Kewajiban
 - Melakukan sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Atas Kejuruan Negeri 1 Klungkung yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif pemilihan;
 - Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung.
- b. Hak
 - Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung
 - Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses pemilihan di Kabupaten Klungkung.

PIHAK KEDUA

- a. Kewajiban
 - Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif pemilihan terhadap siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung;
 - Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung.
- b. Hak
 - Mendapatkan sosialisasi terhadap siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilihan;
 - Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses pemilihan di Kabupaten Klungkung.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman ini.

- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**



I KOMANG SUPARDIKA, S.E
KETUA

**PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN
NEGRI 1 KLUNGKUNG**



I WAYAN SIARSANA, S.Pd
NIP. 196611221988031006